

Ramadhani. M.N., Pertiwi. V.I (2024). Efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Pada Urgensi Ilmu *Parenting* di Kelurahan Kenjeran. *Prediksi*. Vol. 23 (1) 65-75.

Efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Pada Urgensi Ilmu *Parenting* Di Kelurahan Kenjeran

Mutiara Nabilah Ramadhani^{1*}, Vidya Imanuari Pertiwi²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: mutiara.nabilahr@gmail.com, vidya.imanuari.adneg@upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

22 Januari 2024

Received in revised form:

23 Februari 2024

Accepted:

18 Maret 2024

Keyword:

Effectiveness, Kelurahan Kenjeran, *Parenting*, PUSPAGA

Kata Kunci:

Efektivitas, Kelurahan Kenjeran, *Parenting*, PUSPAGA

ABSTRACT

Mental health disorders in children can be caused by inappropriate parenting, which must be resolved through parenting education. The efforts provided by the government are to develop PUSPAGA services that aim to improve gender equality and children's rights (including mental health) in districts/cities in Indonesia, including in Kelurahan Kenjeran. So this study aims to determine the effectiveness of the implementation of PUSPAGA in Kelurahan Kenjeran. The research method used is descriptive qualitative with primary data collection techniques through interviews and observations and secondary data through literature studies. The results showed that based on the five indicators of effectiveness by Riant Nugroho, the implementation of PUSPAGA in Kelurahan Kenjeran has been effective. This is proven by the increasing awareness of the community to conduct consultations and counseling. The increasing awareness of parents towards children's mental health has an impact on the development of children's ability to deal with their problems independently so that they grow into individuals who are healthy mentally and physically. The challenge that arises in the implementation of PUSPAGA is that the people of Kelurahan Kenjeran have a lack of understanding of law. The solution to overcome this is to provide continuous socialization in a longer time span.

ABSTRAK

Gangguan kesehatan mental anak dapat disebabkan oleh pola *parenting* yang kurang tepat dan perlu penanganan melalui edukasi *parenting* untuk mencegah bertambahnya anak dengan gangguan kesehatan mental. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengembangkan layanan PUSPAGA yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan hak-hak anak (termasuk kesehatan mental) di kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Kelurahan Kenjeran. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan PUSPAGA di Kelurahan Kenjeran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan lima indikator efektivitas oleh Riant Nugroho, pelaksanaan PUSPAGA di Kelurahan Kenjeran telah berjalan dengan efektif. Terbukti dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan konsultasi serta konseling. Meningkatnya kesadaran orang tua terhadap kesehatan mental anak berdampak pada berkembangnya kemampuan anak dalam menghadapi masalahnya secara mandiri sehingga dirinya tumbuh menjadi individu yang sehat jiwa dan raga. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan PUSPAGA adalah masyarakat Kelurahan Kenjeran memiliki sifat kurang paham terhadap aspek hukum. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan sosialisasi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih panjang.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: mutiara.nabilahr@gmail.com

PENDAHULUAN

Besarnya beban dan tekanan yang dialami dan tidak diolah dengan baik dapat memengaruhi tubuh manusia, tidak hanya kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Berdasarkan pengertian mengenai kesehatan mental oleh *World Health Organization* (WHO) (2022), dapat diketahui bahwa kesehatan mental mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani dan menghadapi kehidupannya. Gangguan/masalah kesehatan mental tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga dialami oleh anak-anak dan remaja. Gangguan kesehatan mental yang dialami anak perlu mendapat perhatian khusus karena berdasarkan Oktariani (2021) kesehatan mental dibutuhkan anak dalam masa tumbuh kembangnya. Nababan, (2023) menyampaikan berdasarkan pada *Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey* pada 2022, sebanyak 15,5 juta (34,9 %) remaja di Indonesia mengalami masalah mental dan 2,45 juta (5,5 %) remaja mengalami gangguan mental. Dari jumlah tersebut hanya 2,6 persen yang telah mendatangi layanan konseling emosi atau perilaku. Melalui penelitian oleh Nurhasanah, Hurri, & Elnawati (2021) di Kabupaten Sukabumi, diketahui bahwa kesehatan mental berdampak pada hasil belajar anak usia 5-6 tahun. Jika anak dalam kondisi mental yang sehat maka hasil belajar menunjukkan nilai yang baik dan begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian oleh Rahmawaty, Silalahi, T, & Mansyah (2022) menunjukkan bahwa salah satu penyebab yang memengaruhi kesehatan mental anak/remaja adalah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Untuk mencegah semakin bertambahnya anak-anak dan remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental maka diperlukan upaya untuk mengedukasi orang tua agar mulai memperhatikan kesehatan mental anak dalam cara pola asuhnya.

Salah satu sikap pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Daerah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Melalui surat edaran tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan PUSPAGA hingga tingkat daerah ditujukan untuk merealisasikan kesetaraan gender (KG) dan hak anak. Adanya program ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Di kota Surabaya berdasarkan keterangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), hingga bulan Agustus tahun 2023 terdapat total 173 kasus kekerasan yang sedang ditangani dengan rincian kasus berikut ini:

Table 1: Jumlah Kasus Kekerasan Di Surabaya pada Bulan Januari-Agustus 2023

KASUS	JUMLAH
Anak Berhadapan Hukum (ABH)	27
Anak Korban KDRT	26
Kekerasan Anak non KDRT	69
Korban KDRT Dewasa	39
Kekerasan non KDRT Dewasa	12
TOTAL	173

Sumber: Jawa Pos, 2023

Melalui tabel tersebut diketahui bahwa dari 173 kasus, mayoritas kasus yang ditangani adalah kasus kekerasan dengan anak sebagai korban sebanyak 122 kasus. Jumlah ini lebih banyak dari jumlah kasus kekerasan pada usia dewasa sebanyak 51 kasus. Tingginya jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh anak tentu mengakibatkan tingginya anak yang mengalami gangguan kesehatan mental, (Nurfaizah, 2023). Nasution (2016) dalam Nurfaizah (2023), menyebutkan terdapat tiga dampak kekerasan khususnya KDRT terhadap mental anak, "yaitu stress; tidak percaya diri; cemas; dan terbayang-bayang kekerasan yang dilakukan oleh pelaku." Berdasarkan penjelasan tersebut maka pelaksanaan PUSPAGA merupakan hal yang penting untuk mencegah bertambahnya kasus kekerasan dan gangguan kesehatan mental yang dialami oleh anak tak terkecuali di Kelurahan Kenjeran yang berada di daerah pesisir, (Pemerintah Kota Surabaya, 2023).

Adanya kekerasan dalam rumah tangga hingga menjadikan anak sebagai korban tentunya tidak lepas dari cara pengasuhan orang tua kepada anak. Kualitas nilai pengasuhan dalam sebuah keluarga bisa disebabkan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh orang tua. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Miyati, Rasmani, & Fitrianingtyas (2021) bahwa bahwa sebanyak 25,25% hasil penelitian menunjukkan orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan otoriter memiliki tingkat pendidikan rendah. Sedangkan, gaya pengasuhan otoriter sendiri terbukti tidak memberikan efek positif pada tingkat kepercayaan diri anak, (Susanti, Yennizar, & Kiska, 2022). Di Kelurahan Kenjeran, dari total 7.271 penduduk hanya ada 1.609 orang yang telah menamatkan pendidikan SLTA/ sederajat dan sebanyak 50 orang yang telah menyelesaikan studi S1/S2, (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2023). Maka dari itu penilaian efektivitas pelaksanaan PUSPAGA di Kelurahan Kenjeran perlu dilakukan.

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif, sehingga hasil penelitian merupakan deskripsi analisis data yang ditemukan di lapangan. Fokus dari penelitian ini adalah efektivitas kebijakan PUSPAGA di Kelurahan Kenjeran berdasarkan pada lima indikator yang ditetapkan oleh Riant Nugroho. Lima indikator tersebut, yaitu tepat kebijakan; tepat pelaksana; tepat target; tepat lingkungan; dan tepat proses. Sumber data penelitian didapatkan melalui dua cara, yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara terstruktur dengan penentuan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*. Wawancara dilakukan kepada ketua RW, Ketua PKK RW, dan Kasi Kesra Kelurahan Kenjeran selaku pelaksana kebijakan di lingkungan Kelurahan Kenjeran. Data sekunder didapatkan melalui studi literatur pada artikel penelitian terdahulu, diagram, grafik, atau tabel mengenai informasi kependudukan.

Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknis analisis data oleh Miles & Huberman yang terdiri dari tiga tahapan. Tiga tahapan tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau pembuatan kesimpulan. Reduksi data berarti sebuah kegiatan penyaringan data menjadi data yang hanya memuat pokok data dan membuang data yang tidak dibutuhkan. Penyajian data adalah kegiatan penyampaian data berbentuk deskripsi, bagan, dll dengan tujuan untuk mempermudah memahami kejadian yang sedang terjadi. Verifikasi atau pembuatan kesimpulan adalah kegiatan menyimpulkan data yang telah disampaikan sebelumnya, (Fadli, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Kelurahan Kenjeran adalah salah satu wilayah kelurahan yang ada di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Berdasarkan pada situs resmi Pemerintah Kota Surabaya (2023), Kelurahan Kenjeran termasuk dalam daerah Surabaya Utara. Di sebelah utara, Kelurahan Kenjeran berbatasan dengan Kelurahan Kedung Cowek dan di timur berbatasan dengan Kelurahan Sukolilo Baru serta Selat Madura. Sedangkan pada wilayah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukolilo Baru dan di barat berbatasan dengan Kelurahan Bulak. Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Kenjeran adalah sebanyak 7.271 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 3.623 dan perempuan sebanyak 3.648. Namun, sangat disayangkan bahwa dari total jumlah penduduk, hanya ada 1.609 orang yang telah menamatkan jenjang sekolah SLTA/ sederajat dengan rincian sebagai berikut:

Table 2: Jumlah Penduduk Kelurahan Kenjeran Berdasarkan Pendidikan Formal

Tidak/Belum Sekolah	2.345
Tidak/Belum Tamat SD/Sederajat	347
Tamat SD/Sederajat	1.247
Tamat SLTP/Sederajat	756
Tamat SLTA/Sederajat	1.609
D ₁ /D ₂	50
D ₃ /Sarjana Muda	58
D ₄ /S ₁	794
S ₂	59
S ₃	6
JUMLAH	7.271

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan Kenjeran sebanyak 2.345 orang tidak atau belum bersekolah. Sedangkan pendidikan formal tertinggi yang telah ditempu masyarakat Kelurahan Kenjeran adalah SLTA/Sederajat. Meskipun begitu, jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Masyarakat yang menamatkan pendidikan SLTA/Sederajat hanya sebanyak 1.609 orang, sedangkan jumlah penduduk sebanyak 7.271 orang. Pendidikan formal terbanyak kedua yang telah ditempuh oleh masyarakat Kelurahan Kenjeran adalah SD/Sederajat sebanyak 1.247 orang. Total, masyarakat yang telah menempuh pendidikan di bangku perkuliahan adalah sebanyak 967 orang.

Ada berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Kenjeran memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Salah satunya adalah karena kondisi ekonomi yang rendah. Kondisi ekonomi rendah ini disebabkan karena penduduk Kelurahan Kenjeran berprofesi

sebagai nelayan dan wilayahnya dijuluki sebagai Kampung Nelayan, (Diska & Idajati, 2022). Berdasarkan pada hasil observasi, diketahui bahwa kasus putus sekolah juga kerap terjadi di wilayah Kelurahan Kenjeran. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab anak-anak di Kelurahan Kenjeran putus sekolah, yaitu kondisi ekonomi rendah; masalah keluarga; dan kenakalan remaja. Dua faktor penyebab putus sekolah, yaitu permasalahan keluarga dan kenakalan remaja bisa ditangani dan dicegah dengan menerapkan cara *parenting* yang baik. Melalui pola *parenting* yang baik, komunikasi dan hubungan antar anggota keluarga bisa berdampak positif pada perkembangan anak. Namun, penerapan pola *parenting* yang baik akan terkendala dengan tingkat pendidikan orang tua dalam sebuah keluarga.

Rendahnya tingkat pendidikan terutama orang tua dapat berakibat pada nilai-nilai *parenting* yang diterapkan dalam keluarga. Telah disebutkan di latar belakang bahwa orang tua dengan tingkat pendidikan rendah lebih memilih untuk menggunakan jenis *parenting* otoriter yang tidak berdampak positif pada rasa kepercayaan diri anak, (Susanti, Yennizar, & Kiska, 2022). Tentu penerapan pola *parenting* yang berdampak negatif pada kesehatan mental anak harus diperbaiki agar tidak terulang kembali pada generasi selanjutnya. Salah satu contoh pencegahan dan perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan menjalankan SE Kemen PPPA No. 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Daerah. Pengembangan layanan PUSPAGA dilaksanakan hingga tingkat RW. Hal ini dilakukan agar layanan konsultasi, konseling, dan edukasi keluarga bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

Di Kelurahan Kenjeran, layanan PUSPAGA balai RW tersedia pada RW 1, 2, dan 3. Tersedianya layanan ini tidak terjadi secara serentak, melainkan didahului oleh RW 3 pada bulan Agustus 2023 dan disusul oleh RW 1 dan 2 pada bulan November 2023. Melalui PUSPAGA balai RW, DP3APPBK Kota Surabaya memberikan kelas *parenting* untuk warga. Selain itu upaya edukasi juga dilaksanakan melalui sosialisasi melalui kegiatan perkumpulan warga. Melalui usaha-usaha tersebut, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat Kelurahan Kenjeran pada pentingnya penerapan pola *parenting* yang baik dan lebih memperhatikan kesehatan mental anak mereka.

Selain layanan edukasi dan sosialisasi, PUSPAGA balai RW juga memberikan layanan konsultasi dan konseling untuk keluarga. Bagi warga yang merasa memiliki permasalahan keluarga bisa mendatangi balai RW untuk melakukan konsultasi atau konseling. Jika permasalahan tidak bisa diselesaikan pada tingkat RW, maka petugas PUSPAGA balai RW akan memberikan rujukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Data dan identitas warga sebagai klien juga dijamin kerahasiaannya, sehingga warga tidak perlu khawatir permasalahan keluarga yang dialaminya akan diketahui oleh orang lain.

Pembahasan

Pelaksanaan PUSPAGA yang baik akan berdampak baik pada kesadaran masyarakatnya. Maka penelitian yang telah dilaksanakan terkait efektivitas PUSPAGA dalam penyediaan pentingnya ilmu pola asuh di Kelurahan Kenjeran maka dapat diketahui hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Tepat Kebijakan

Pada indikator pertama, yaitu tepat kebijakan menunjukkan apakah sebuah kebijakan sudah sesuai untuk mengatasi masalah yang dituju melalui isi dalam kebijakan itu sendiri. Kota Surabaya menjadi salah satu kota yang mengembangkan PUSPAGA sesuai dengan

amanat dalam SE Kemen PPA No. 57 Tahun 2020. Untuk mengatasi tingginya kasus kekerasan yang dialami anak yang kemudian mengarah pada terganggunya kesehatan mental anak, DP₃PPKB Kota Surabaya selaku OPD yang bertanggung jawab dalam menjalankan PUSPAGA mengadakan kelas *parenting* yang ditujukan untuk seluruh masyarakat Kota Surabaya. Kelas *parenting* merupakan langkah untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak melalui edukasi cara pengasuhan anak. Selain itu, PUSPAGA merupakan layanan konsultasi dan konseling bagi keluarga, sehingga sesuai dengan masalah yang ingin diatasi. Masalah keluarga merupakan masalah pribadi sehingga adanya layanan konseling dan konsultasi bisa menjadi langkah tepat untuk keluarga mendiskusikan dan mencari solusi atas masalah yang mereka alami. Sesuai dengan target, yaitu untuk meningkatkan kesetaraan gender dan hak anak untuk meningkatkan ketahanan keluarga maka lembaga yang mengeluarkan kebijakan ini adalah Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Tepat Pelaksana

Indikator kedua menilai keefektifan kebijakan melalui pelaksana kebijakan tersebut. PUSPAGA merupakan kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat karena kebijakan ini bertujuan memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Maka sesuai dengan sifatnya yang memberdayakan masyarakat, pelaksana dari kebijakan ini adalah pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan adalah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan di Kota Surabaya adalah DP₃APPKB, pihak kecamatan, kelurahan, RW, dan RT. Unsur masyarakat yang bertugas untuk melaksanakan di Kota Surabaya adalah TP PKK, KSH, relawan PKBM, satgas PPA, dan Karang Taruna. Terlibatnya unsur masyarakat dalam kebijakan ini juga dikarenakan di Kota Surabaya layanan PUSPAGA ada hingga tingkat RW sehingga dibutuhkan kerja sama dengan masyarakat agar program bisa dijangkau lebih dekat oleh masyarakat tak terkecuali di Kelurahan Kenjeran.

3. Tepat Target

Dalam PUSPAGA target/sasaran kebijakan adalah anak, orang tua, dan semua orang yang bertanggung jawab terhadap anak seperti kakek dan nenek serta ART. Sasarannya sesuai dengan perencanaan karena gangguan kesehatan mental anak didapatkan salah satunya karena cara pola asuh keluarga yang kurang tepat, sehingga ketepatan sasaran ini bisa memenuhi peningkatan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Di Kelurahan Kenjeran berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Perekonomian serta dengan Ketua RW di Kelurahan Kenjeran, sasaran kebijakan dalam hal ini warga Kelurahan Kenjeran dalam keadaan sebagian mendukung dan sebagian memberikan respon tidak peduli terhadap kebijakan PUSPAGA. Hal ini terjadi dikarenakan banyak masyarakat dalam keadaan kurang paham aspek hukum termasuk bahwa melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain terutama keluarga dan anak merupakan tindakan melanggar hukum dan HAM. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi yang dilaksanakan secara terus menerus dan memang memerlukan waktu untuk memberikan pemahaman kepada warga dengan sikap yang seperti ini. PUSPAGA sendiri merupakan kebijakan yang bersifat baru karena belum ada sebelumnya kebijakan terkait penyediaan layanan konsultasi, konseling, dan edukasi pola asuh untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Namun, di Kota Surabaya salah satu kegiatan PUSPAGA adalah pelaksanaan kelas *parenting* yang diikuti warga melalui balai RW atau *zoom meeting* yang merupakan pembaruan dari kebijakan Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya, yaitu Surabaya Orang Tua Hebat (SOTH). Pembaruan terjadi pada aspek

peserta. Pada SOTH yang menjadi peserta adalah orang tua yang memiliki anak balita terutama yang berada dalam status pra stunting. Namun pada kelas *parenting* semua orang yang bertanggung jawab pada anak bisa ikut sebagai peserta. Pada indikator ketiga, PUSPAGA di Kelurahan Kenjeran sudah tepat target/sasaran dan merupakan kebijakan baru, tetapi program kelas *parenting* merupakan program pembaruan dari kebijakan SOTH. Meskipun begitu keadaan warga di Kelurahan Kenjeran sebagai target belum semuanya mendukung karena merupakan masyarakat yang kurang paham terhadap aspek hukum.

4. Tepat Lingkungan

Pada lingkungan internal, pelaksana kebijakan di Kelurahan Kenjeran dalam hal ini kelurahan, RW, dan RT berjejaring dengan unsur masyarakat dan memiliki hubungan yang baik. Unsur masyarakat yang bekerja sama dalam pelaksanaan PUSPAGA adalah TP PKK, KSH, relawan PKBM, Satgas PPA, dan Karang Taruna. Pelaksana kebijakan dimulai dari pihak pemerintah seperti kelurahan dan RW telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan PUSPAGA, tetapi dukungan kurang didapatkan pada beberapa ketua RT di RW 1 dan 2. Pada unsur masyarakat tidak semua anggota kader memiliki keinginan untuk ikut melancarkan kegiatan PUSPAGA. Hal ini dikarenakan kader ada yang belum memiliki pemahaman dengan baik terkait PUSPAGA, anggota kader memiliki kesibukan lain pada waktu pelaksanaan piket di balai RW, dan ada kader yang kurang peduli terhadap pelaksanaan PUSPAGA. Khususnya pada RW 1 dan 2 yang kegiatan PUSPAGAnyanya baru saja dimulai pada bulan November 2023. Sedangkan pada RW 3, kegiatan PUSPAGA telah berlangsung sejak bulan Agustus 2023 dan tingkat partisipasi warga serta kadernya lebih tinggi daripada RW yang lain. Pada lingkungan eksternal secara umum pelaksanaan PUSPAGA di Kelurahan belum mendapatkan kritikan baik dari warga ataupun khususnya dari media masa. Hanya saja terdapat beberapa saran yang disampaikan oleh Ketua PKK RW 3, yaitu diperlukannya anggaran dana operasional untuk konsumsi kader yang menjalankan piket di balai RW atau ketika sedang melaksanakan konseling dan konsultasi. Maka pada indikator tepat lingkungan meskipun masih ada masyarakat dan kader yang kurang mendukung, PUSPAGA tetap bisa berjalan dengan dukungan masyarakat dan kader lain yang sangat membantu.

5. Tepat Proses

Indikator tepat proses terdiri dari tiga poin, yaitu *policy acceptance*, *policy adoption*, dan *policy readiness* yang sebenarnya merupakan tahapan dari proses kebijakan itu sendiri. Pada Kelurahan Kenjeran terkait efektivitas proses kebijakan diketahui bahwa:

1) *Policy Acceptance*

Pada poin ini artinya adalah masyarakat dan pemerintah telah memahami kebijakan yang harus dijalankan untuk kepentingan di masa depan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Di Kelurahan Kenjeran dimulai dari kader, warga, dan penurus RW serta kelurahan sudah banyak yang memahami terkait urgensi dari PUSPAGA. Meskipun begitu, berdasarkan pada penjelasan sebelumnya tentu masih ada masyarakat yang belum memahami PUSPAGA karena masyarakat Kelurahan Kenjeran yang berada di pesisir memiliki kekurangan pada pemahaman dalam aspek hukum.

2) *Policy Adoption*

Pada tahap kedua, *policy adoption* berarti masyarakat dan pemerintah sudah menerima sebuah kebijakan. Tahap penerimaan ini penting karena pemahaman saja tidak cukup

untuk menjalankan sebuah kebijakan. Adanya penerimaan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Di Kelurahan Kenjeran, dari pihak pemerintah dan dari unsur masyarakat sudah menerima bahwa PUSPAGA adalah program yang harus dilaksanakan. Penerimaan tidak terjadi begitu saja, tetap ada waktu untuk masyarakat baik dari RW 1,2, dan 3 untuk menerima PUSPAGA yang juga merupakan kebijakan baru. Di RW 3, karena PUSPAGA sudah berjalan lebih lama maka kader dan masyarakatnya sudah lebih menerima dari pada kader dan masyarakat di RW 1 dan 2. Di RW 1 dan 2, kader dan masyarakat masih dalam tahap penerimaan PUSPAGA sebagai layanan konsultasi, konseling, dan edukasi pola asuh. Sama seperti tahap sebelumnya bahwa meskipun PUSPAGA diterima dengan baik, masih ada masyarakat yang tidak memberikan respon apakah menolak atau menerima.

3) *Policy Readiness*

Tahap *policy readiness* artinya adalah bahwa masyarakat dan pemerintah sudah siap untuk menjalankan sebuah kebijakan. Jika dua tahap sebelumnya telah mendapatkan respon yang positif maka pada tahap ini juga seharusnya menunjukkan respon yang positif. Di Kelurahan Kenjeran Pemkot Surabaya tentunya sudah siap untuk menjadi pelaksana dari PUSPAGA ditunjukkan dengan tersedianya balai RW di tiap-tiap RW untuk melaksanakan kegiatan PUSPAGA juga adanya staff Kelurahan Kenjeran yang ikut datang pada piket PUSPAGA di balai RW. Masyarakat juga sudah menunjukkan kesiapan dalam melaksanakan PUSPAGA khususnya pada RW 3, sedangkan pada RW 1 dan 2 masih diperlukan waktu dan usaha yang lebih panjang. Meskipun begitu, di semua RW kesiapan masyarakat dibuktikan melalui kesadaran untuk mendatangi balai RW atau melapor pada DP3APPKB untuk melakukan konsultasi dan konseling terkait permasalahan keluarga yang dihadapi. Tak hanya itu, kesiapan juga ditunjukkan dengan masyarakat yang mendatangi kelas *parenting* di balai RW untuk menerima ilmu baru. Terlaksana dan diadikannya kelas *parenting* oleh masyarakat secara rutin dan adanya kegiatan konsultasi dan konseling menunjukkan bahwa masyarakat sudah siap untuk menjalankan PUSPAGA.

Berdasarkan pada hasil pembahasan tersebut maka ada dua saran untuk kegiatan PUSPAGA di Kelurahan Kenjeran. Pertama, terkait dengan indikator tepat target, untuk mengatasi masyarakat Kelurahan Kenjeran yang kurang memahami aspek hukum dan pada indikator tepat lingkungan internal terkait kurangnya pemahaman kader terhadap PUSPAGA maka diperlukan sosialisasi secara terus menerus pada seluruh lapisan masyarakat. Saran kedua terkait dengan penyediaan anggaran dana operasional pelaksanaan PUSPAGA di balai RW. Anggaran dana dimaksudkan untuk memberikan konsumsi seperti minum dan makanan ringan untuk kader yang sedang melaksanakan piket dan konsultasi serta konseling. Anggaran juga dibutuhkan untuk menyiapkan kebutuhan kegiatan seperti buku kegiatan, buku presensi, serta penyediaan dokumen seperti *inform consent* dan surat rujukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil observasi maka diketahui bahwa rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Kenjeran diakibatkan oleh rendahnya tingkat ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan kemudian menyebabkan pemberian nilai pola *parenting* yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental anak. Siklus ini telah diberikan upaya penanganan dan pencegahan melalui layanan PUSPAGA balai RW.

PUSPAGA balai RW tersedia di balai RW 1, 2, dan 3 di Kelurahan Kenjeran. Pelaksanaan PUSPAGA balai RW dilakukan bekerja sama dengan unsur masyarakat seperti TP PKK, KSH, relawan PKBM, satgas PPA, dan Karang Taruna. Unsur masyarakat bersama dengan Kelurahan Kenjeran berupaya untuk memberikan edukasi terkait penerapan pola *parenting* yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PUSPAGA di Kelurahan Kenjeran berdasarkan pada lima indikator efektivitas oleh Riant Nugroho menunjukkan hasil yang baik. Pada indikator tepat target diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Kenjeran berada dalam kondisi kurang memahami aspek hukum sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk melaksanakan sosialisasi yang berkelanjutan. Lima indikator menunjukkan bahwa pelaksanaan PUSPAGA di Kelurahan Kenjeran sudah efektif. Efektivitas tersebut dibuktikan dari meningkatnya kesadaran masyarakat yang sebelumnya tidak terbuka dan abai terhadap pola asuh menjadi sadar akan dampak pola pengasuhan kurang baik yang mereka lakukan dengan mendatangi layanan konsultasi dan konseling PUSPAGA di balai RW untuk menyelesaikan masalah keluarga yang dialami. Hal ini juga dibuktikan melalui keterangan Kasi Kesra Kelurahan Kenjeran bahwa laporan kekerasan yang diterima kantor kelurahan berkurang drastis sejak berjalannya PUSPAGA.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'Ari, A. I. (2023, Oktober 3). *Miris! Ratusan Kasus Kekerasan Melibatkan Anak Masih Ditemukan di Surabaya*. Retrieved from JawaPos.com: <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013038748/miris-ratusan-kasus-kekerasan-melibatkan-anak-masih-ditemukan-di-surabaya>
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2023). *Kecamatan Bulak dalam Angka*. Surabaya: BPS Kota Surabaya.
- Diska, N. A., & Idajati, H. (2022). Karakteristik Pemukiman Kumuh di Kampung Nelayan Kejawan Lor Berbasis Eco-Settlements. *Jurnal Teknik ITS*, 62-27.
- Fadhilah, T. N., Handayani, D. E., & Rofian, R. (2019). Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran*, 249-255.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat Edaran Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Daerah
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga PUSPAGA*. Jakarta: Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak.
- Mawuntu, P., Rares, J., & Plangiten, N. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKMo Skala Mikro dalam Penyebaran COVID-19 di Desa Warembungan. *Jurnal Administrasi Publik*, 107-118.
- Miyati, D. S., Rasamani, U. E., & Fitrianingtyas, A. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak. *Jurnal Kumara Cendekia*, 139-147.
- Nababan, W. M. (2023, February 1). *Cita-Cita Indonesia 2045 Terhalang Masalah Kesehatan Mental Remaja*. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/01/cita-cita-indonesia-2045-terhalang-masalah-kesehatan-mental-remaja>
- Nadhifah, I., Kanzunudin, M., & Khamdun. (2021). Analisis Peran Pola Asih Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak. *Jurnal Educatio*, 91-96.
- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Meia Komputindo.
- Mutiara Nabilah Ramadhani, Vidya Imanuari Pertiwi. (2024). *Prediksi*. Vol. 23 (1) 65-75.

- Nurfaizah, I. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. *Gunung Djati Conference* (pp. 95-103). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Nurhasanah, Hurri, I., & Elnawati. (2021). Analisis Hubungan Kesehatan Mental Terhadap Hasil Belajar Anak 5-6 Tahun Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Pelita PAUD*, 74-80.
- Oktariani. (2021). Dampak Toxic Parents dalam Kesehatan Mental Anak. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan (J-P3K)*, 215-222.
- Asy'Ari, A. I. (2023, Oktober 3). *Miris! Ratusan Kasus Kekerasan Melibatkan Anak Masih Ditemukan di Surabaya*. Retrieved from JawaPos.com: <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013038748/miris-ratusan-kasus-kekerasan-melibatkan-anak-masih-ditemukan-di-surabaya>
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2023). *Kecamatan Bulak dalam Angka*. Surabaya: BPS Kota Surabaya.
- Diska, N. A., & Idajati, H. (2022). Karakteristik Pemukiman Kumuh di Kampung Nelayan Kejawan Lor Berbasis Eco-Settlements. *Jurnal Teknik ITS*, 62-27.
- Fadhilah, T. N., Handayani, D. E., & Rofian, R. (2019). Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran*, 249-255.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat Edaran Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Daerah
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga PUSPAGA*. Jakarta: Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak.
- Mawuntu, P., Rares, J., & Plangiten, N. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro dalam Penyebaran COVID-19 di Desa Warembungan. *Jurnal Administrasi Publik*, 107-118.
- Miyati, D. S., Rasamani, U. E., & Fitrianingtyas, A. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak. *Jurnal Kumara Cendekia*, 139-147.
- Nababan, W. M. (2023, February 1). *Cita-Cita Indonesia 2045 Terhalang Masalah Kesehatan Mental Remaja*. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/01/cita-cita-indonesia-2045-terhalang-masalah-kesehatan-mental-remaja>
- Nadhifah, I., Kanzunnudin, M., & Khamdun. (2021). Analisis Peran Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak. *Jurnal Educatio*, 91-96.
- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Meia Komputindo.
- Nurfaizah, I. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. *Gunung Djati Conference* (pp. 95-103). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Nurhasanah, Hurri, I., & Elnawati. (2021). Analisis Hubungan Kesehatan Mental Terhadap Hasil Belajar Anak 5-6 Tahun Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Pelita PAUD*, 74-80.
- Oktariani. (2021). Dampak Toxic Parents dalam Kesehatan Mental Anak. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan (J-P3K)*, 215-222.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023, 12 19). *Kelurahan Kenjeran*. Retrieved from pemerintahan.surabaya.go.id: https://pemerintahan.surabaya.go.id/kelurahan_kenjeran
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023, November 7). *Wujudkan Keluarga Harmonis, Pemkot Surabaya Berikan Kelas Parenting PUSPAGA di Balai RW*. Retrieved from surabaya.go.id: <https://www.surabaya.go.id/id/berita/77162/wujudkan-keluarga-harmonis-pemkot-surabaya-berikan-kelas-parenting-puspaga-di-balai-rw>
- Rahmawaty, F., Silalahi, R. P., T, B., & Mansyah, B. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental pada Remaja. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 276-281.

- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 247-262.
- Sore, U. B., & Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Susanti, N., Yennizar, & Kiska, N. D. (2022). Hubungan Antar Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Kepercayaan Diri Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 29-34.
- Syahrul, S., & Nurhafizah, N. (2021). Analisis Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia Dini DImasa Pandemi Corona Virus 19. *Jurnal Basicedu*, 683-696.
- Taib, B., Ummah, D. M., & Yuliyanti, B. (2020). Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak. *JICP: Jurnal Ilmiah Cahaya PAUD*, 128-137.
- World Health Organization. (2022, June 17). *Mental Health*. Retrieved from World Health Organization: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response/?gclid=EAlalQobChMImlrW34j8gQMVOYJLBR1hvQhXEAAAYASAAEgL61PD_BwE